



Renja **RENCANA KERJA** *T.A. 2025*



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SOPPENG**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja 2025 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di dalam Renja 2025 ini memuat perencanaan program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dokumen perencanaan pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 dan diharapkan dengan disusunnya Renja 2025 ini menjadi kerangka dan acuan penting dalam pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 dalam mencapai tujuan Sekretariat DPRD ***Meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi DPRD*** serta ***Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja*** sehingga menunjang pelaksanaan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng ***Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera***.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Watansoppeng, 15 Juli 2024,
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

H. A. ZULKIFLI NORDIN, SH

Pangkat : Pembina

Nip : 19710908 200604 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026..... 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD 19

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaan program dan Usulan Kegiatan Masyarakat..... 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 24

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 24

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD..... 24

3.3 Program dan Kegiatan 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

BAB V PENUTUP 27

LAMPIRAN DOKUMEN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025..... 29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi satuan kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan fungsinya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan rakyat Daerah yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Anggaran dan Pengawasan. Segala sesuatu terkait kebutuhan pelayanan tersebut telah terangkum dalam dokumen Renja Sekretariat DPRD.

Atas latar belakang itulah sehingga pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 (Renja 2025) yang memuat program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 (RKPD 2025) dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng 2021-2026 (Renstra 2021-2026). Oleh karena itu secara substansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Sekretariat DPRD.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.



1.1.2 Proses Penyusunan Renja

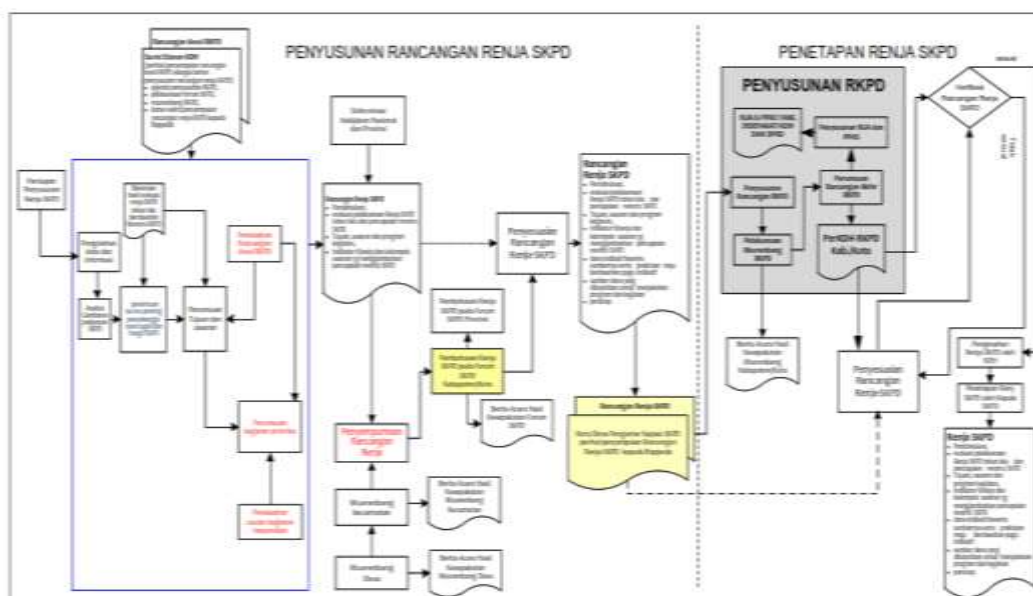
Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPd. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPd, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Tahapan penetapan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di Lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Renja SKPD yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah RKPd
2. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
3. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tabel 1. 1
Bagan Alur Renja SKPD Kabupaten/Kota



Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja;
 - Orientasi mengenai Renja;
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja;
 - Pengumpulan Data dan Informasi.
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan Renja.

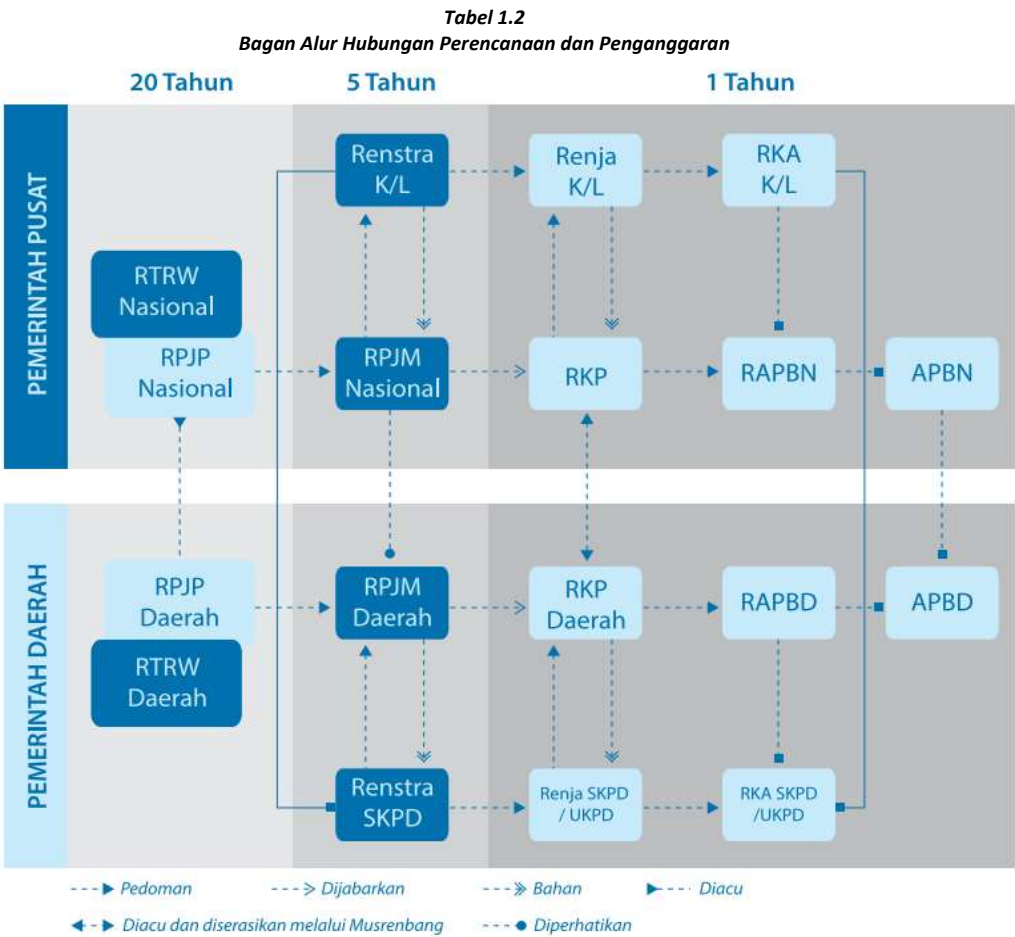


- c. Tahap Perumusan Renja
 - Pengolahan Data dan Informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - Mereview hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - Telaah terhadap RKPD;
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen Renja SKPD;
 - Penyempurnaan Rencana kerja SKPD;
 - Pembahasan Forum SKPD; dan
 - Penyesuaian dokumen Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Pernyajian dan penyampaian Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan Renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Adapun skema Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat dibawah ini:





1.1.4 Tindak Lanjut Renja dengan Proses Penyusunan RAPBD

Renja SKPD menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam Program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Adapun Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

- a. PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
- b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
- d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
- e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
- 8) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);



- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 14) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
- 27) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 86);
- 28) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 34);



- 29) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 14).
- 30) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
- 31) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26);
- 32) Keputusan Bupati Soppeng Nomor 502/XI/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahan Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja 2025 dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD. Disamping itu penyusunan Renja 2025 dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian visi, misi dan program serta tolok ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir Tahun Anggaran.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renja 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Tersusunnya instrument rencana kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
3. Tersusunnya program-program pembangunan dan rencana kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun menurut sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bagian ini memuat:

- a. Latar Belakang, yaitu bagian yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD, keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- b. Landasan Hukum, yaitu bagian yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat DPRD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD.



- c. Maksud dan Tujuan, yaitu bagian yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD.
- d. Sistematika Penulisan, yaitu bagian yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;



- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
 - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- Berisikan uraian mengenai:
- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
 - 2) RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - 3) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - 4) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
- 1) Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
 - 2) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - 3) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, yaitu yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
 - a. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD, yaitu bagian yang berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD.
 - b. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai:
 - 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,

Yaitu bagian yang mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Sekretariat DPRD yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra 2021-2026. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Penutup

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, serta dicap dan ditandatangani Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng.





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 disusun sebagai amanat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada penyusunan Renja Sekretariat DPRD 2024 dilakukan pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022 dan tetap dilakukan review dan proyeksi capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun berjalan (Tahun 2023).

2.1.1. Review Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Pada tahun 2023 Sekretariat DPRD melaksanakan 63 Sub Kegiatan yang tersebar dalam 16 Kegiatan dan 2 program. Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang dibuat mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 (LKjIP) dan realisasi APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, rata-rata hasil pencapaian kinerja sebesar 99,72% dengan capaian realisasi kinerja sangat tinggi. Artinya, pada tahun 2023 Sekretariat DPRD dapat dikatakan berkinerja sangat baik, dengan ringkasan capaian, faktor yang mempengaruhi serta implikasi terhadap capaian Renstra dijabarkan sebagai berikut:

1) Review capaian kinerja program/kegiatan.

Pada tahun 2023, hampir semua program, kegiatan dan subkegiatan telah memenuhi bahkan beberapa diantaranya melebihi target 100%. Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja program/kegiatan tersebut adalah peran aktif dan komitmen tinggi para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, dan mampu berinteraksi dengan semua pihak terkait khususnya Pimpinan dan Anggota DPRD.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 10 kegiatan dan 32 subkegiatan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Kegiatan Program Pelayanan Perkantoran

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi				Jumlah	%
			TWI	TWII	TWIII	TWIV		
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100,00

Adapun capaian kegiatan pada program tersebut sebagai berikut:

- a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerjanya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari 2 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 2 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 93,76%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.



- Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Indikator kinerjanya Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 90,08%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Indikator kinerjanya Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 100%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator kinerjanya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari 27 Laporan yang ditargetkan, terealisasi 27 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 84.82%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator kinerjanya Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang ditargetkan 36 ASN terealisasi 36 ASN atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 97,21%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator kinerjanya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dari 96 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 96 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.96%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator kinerjanya Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dari 36 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 36 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 65.00%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Indikator kinerjanya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dari 12 Laporan yang ditargetkan, terealisasi 12 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 66.77%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator kinerjanya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dari 4 Laporan yang ditargetkan, terealisasi 4 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi



anggaran 100%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

➤ Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator kinerjanya Jumlah Dokumen Kepegawaian dari 5 Dokumen yang ditargetkan terealisasi 5 dokumen atau tercapai 100%. Dengan Realisasi Anggaran Sebesar 91.32%.

➤ Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator kinerjanya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dari 2 Dokumen yang ditargetkan terealisasi 2 dokumen atau mencapai 100%. Dengan Realisasi anggaran sebesar 100%.

➤ Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Indikator kinerjanya Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai sebanyak 36 dokumen terealisasi 36 dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi Anggaran sebesar 100%.

➤ Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerjanya Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 36 Orang terealisasi 36 Orang atau tercapai 100%. Dengan realisasi Anggaran sebesar 100%.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

➤ Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dengan indikator kinerja Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan dari 25 Paket yang ditargetkan, terealisasi 25 paket atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.94%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.

➤ Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan dari 21 paket yang ditargetkan, terealisasi 21 paket atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.88%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.

➤ Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan dari 1 Paket yang ditargetkan, terealisasi 1 Paket atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 100%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.

➤ Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dengan indikator kinerja Jumlah Jenis Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan dari 6 Paket yang ditargetkan, terealisasi 6 Paket atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 73.80%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.

➤ Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material

Dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan dari 5 Paket yang ditargetkan, terealisasi 5 Paket atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.97%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.



- Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Dengan indikator kinerja Jumlah Kunjungan Tamu dari 7 Laporan yang ditargetkan, terealisasi 7 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 97.91%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan dari 12 Laporan yang ditargetkan, terealisasi 12 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.93%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD
Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dari 3 dokumen yang ditargetkan, terealisasi 3 dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.72%.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan Mebel
Dengan indikator kinerja Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan dari 6 Unit yang ditargetkan, terealisasi 6 Unit atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.66%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dengan indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan dari 39 Unit yang ditargetkan, terealisasi 39 Unit atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.82%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan dari 12 Laporan yang ditargetkan, terealisasi 12 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 86,13%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dari 12 laporan yang ditargetkan, terealisasi 12 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 91,03%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya dari 36 Unit yang ditargetkan, terealisasi 36 unit atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 96.59%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Berfungsi dengan baik dari 28 Unit yang ditargetkan, terealisasi 28 unit atau tercapai 100%. Dengan realisasi



anggaran 85.56%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan

- Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dengan indikator kinerja jumlah Gedung atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dari 5 Unit yang ditargetkan, terealisasi 5 Unit atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.86%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Dengan indikator kinerja Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD dari 30 Orang yang ditargetkan, terealisasi 30 orang atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.06%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan
- Subkegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Dengan indikator kinerja Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan dari 30 Paket yang ditargetkan, terealisasi 30 paket atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.81%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan
- Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check UP DPRD
Dengan indikator kinerja Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check UP DPRD dari 30 Orang yang ditargetkan terealisasi 15 orang atau tercapai 50% .Dengan realisasi anggaran sebesar 69.02%

j. Layanan Administrasi DPRD

- Subkegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil failitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD dari 1 laporan yang ditargetkan dan untuk Tahun 2023 tidak ada realisasi baik kinerja maupun keuangan.
- Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Dengan indikator kinerja Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan dari 3 Paket yang ditargetkan, terealisasi 3 paket atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.10%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini terdiri dari 6 kegiatan dan 25 subkegiatan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi				Realisasi	capaian
			TWI	TWII	TWIII	TWIV		
Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD yang terlaksana sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	100	100,00



Adapun capaian subkegiatan pada program tersebut sebagai berikut:

- a. **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**
 - **Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dari 3 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 3 dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 97.67%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan
 - **Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari 11 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 11 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.87%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - **Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi dari 3 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 3 dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 100%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- b. **Pembahasan Kebijakan Anggaran**
 - **Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.32%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - **Subkegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**

Dengan indikator kinerja Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.35%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - **Subkegiatan Pembahasan APBD**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.91%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - **Subkegiatan Pembahasan APBD Perubahan**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.85%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - **Subkegiatan Pembahasan Laporan Semester**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Persemester dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.82%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.



- Subkegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawab APBD dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.74%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum dari 1 Laporan yang ditargetkan, terealisasi 1 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 100%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur
Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dari 1 Laporan yang ditargetkan, terealisasi 1 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 100%,-. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat
Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Difasilitasi dari 1 Laporan yang ditargetkan, terealisasi 1 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 48.98%,-. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
Dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dari 1 Laporan yang ditargetkan, terealisasi 1 Laporan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 48.98%,-. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam
Dengan indikator Jumlah Agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang SDA Yang Difasilitasi dari 1 Kegiatan yang ditargetkan, terealisasi 1 Kegiatan atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 48.98%,-. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 100%,-. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
Dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 100%,-. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai target yang diharapkan.



- Subkegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Dengan indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 33.70%,-. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD
Dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil pendalaman tugas DPRD dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 82.11%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Dengan indikator Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.98%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Dengan indikator Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli dari 2 Orang yang ditargetkan, terealisasi 2 Orang atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 100%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Dengan indikator Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dari 5 Orang yang ditargetkan, terealisasi 5 Orang atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 100%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
Dengan indikator Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.99%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Dengan indikator Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun dari 3 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 3 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 100%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.
 - Subkegiatan Pelaksanaan Reses
Dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses dari 3 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 3 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.41%..
- f. Fasilitasi Tugas DPRD
 - Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dari 12 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 12 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 82.64%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.



- Subkegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
Dengan indikator Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun dari 1 Dokumen yang ditargetkan, untuk tahun 2023 belum ada realisasi baik kinerja maupun keuangan.
- Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dari 1 Dokumen yang ditargetkan, terealisasi 1 Dokumen atau tercapai 100%. Dengan realisasi anggaran 99.57%. Kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga mencapai target yang diharapkan.

2) Kebijakan dan tindakan perencanaan

Apabila disimpulkan, beberapa faktor penyebab tidak tercapainya kinerja dan keuangan program dan kegiatan adalah:

- Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
- Kurangnya sosialisasi ke Masyarakat terkait pelaksanaan fungsi DPRD, begitupula metode penyampaian aspirasi.
- Dinamika kegiatan Dewan yang sangat cepat dan padat sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
- Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan yang dilakukan Sekretariat DPRD adalah:

- Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD kualitas penyusunan kajian perundang-undangan dengan merencanakan program kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- Meningkatkan sosialisasi ke Masyarakat terkait pelaksanaan fungsi DPRD, begitupula metode penyampaian aspirasi.
- Secara berkala telah melakukan komunikasi, Anggota dan Pimpinan Alat kelengkapan DPRD apabila ada permasalahan mendesak diadakan Rapat Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan.
- Menyampaikan informasi kepada Pimpinan DPRD Alat Kelengkapan terkait dengan program, kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan serta memberikan pertimbangan argumentasi kepada Pimpinan DPRD terkait penyerapan anggaran.

Detail review pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 2.2 atau tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan Tahun 2022.

2.1.2. Implikasi yang Timbul Terhadap Perkiraan Capaian Renja Tahun 2023 terhadap Capaian Renstra 2021-2026

Pada Tahun 2022, Sekretariat DPRD melaksanakan 2 Program yang terdiri dari 16 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan. Dari 63 subkegiatan tersebut diproyeksikan mencapai lebih dari 100%. Hal tersebut dapat dilihat dari progres pelaksanaan kegiatan hingga triwulan ke I berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan.

Capaian kinerja program sendiri diproyeksi akan lebih dari 100%. Indikator kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap alat-alat kelengkapan DPRD yang terlaksana sesuai rencana yang sebelumnya ditargetkan 100% diproyeksi akan terealisasi 100%. Begitu pula dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target 100% diproyeksi dapat terealisasi 100% pula.

Detail proyeksi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 juga dapat dilihat pada lampiran 2.3 atau tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan Tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah salah satu satuan kerja yang yang tidak memiliki indikator yang sudah ditentukan atau ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga pada penyusunan Renstra 2021-2026 dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng 2021-2026 sebagai kinerja pelayanan Sekretariat DPRD serta Indikator yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD hingga Tahun 2022 dan proyeksi hingga Tahun 2024 digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng

NO	INDIKATOR	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
	PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017											
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR TUJUAN												
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Fungsi DPRD		78,00%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	85,00%			78,00%	78,00%
5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%
INDIKATOR SASARAN												
6	Persentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	94.70%	100%	100%
7	Persentase Aparatur Yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
8	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng		77,00%	79,00%	81,00%	83,00%	85,00%	87,00%	76.57%	79%	81,00%	83,00%



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

1. Kinerja Pelayanan, Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2023 dan diproyeksi hingga Tahun 2026 akan mencapai target 100%. Begitu pula dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai kerangka utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Akan tetapi dibalik capaian tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi hingga diterbitkannya Renja 2025 ini adalah:

- Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan sosialisasi kepada Anggota DPRD maupun aparatur Sekretariat DPRD.
- Perubahan personil/mutasi baik pejabat struktural maupun staf penjabat fungsional umum yang setiap saat berubah. Sehingga membutuhkan adaptasi lingkungan kerja bagi pegawai baru yang sangat jauh berbeda dengan satuan kerjanya sebelumnya.
- Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar bagian ditambah masih ada aparatur yang belum mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Terlalu gemuknya aparatur non PNS yang tentunya membutuhkan penganggaran gaji yang sangat tinggi pula.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting, sehingga terjadi kesalahan dan permasalahan berulang pada pelaksanaan program atau kegiatan.

2. Dampak Terhadap Kebijakan Nasional serta Visi dan Misi Kepala Daerah.

Uraian permasalahan dan hambatan tersebut tidak berdampak langsung terhadap program nasional karena tidak ada program nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi DPRD. Akan tetapi berdasarkan permasalahan dan hambatan tersebut tentunya berdampak secara tidak langsung pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah antara lain:

- a) Terhambatnya pelaksanaan pelayanan pada Sekretariat DPRD khususnya pelayanan pelaksanaan fungsi DPRD dalam mencapai misi 5 Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.
- b) Respon untuk mengoptimalkan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam mewujudkan visi “Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”.

3. Tantangan, Peluang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya memperhatikan beberapa faktor permasalahan dan penghambat, terdapat beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng antara lain.

a. Tantangan

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dalam pengembangan pelayanan adalah:

- 1) Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari Pimpinan dan segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD.



- 2) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 3) Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD.
- 4) Lemahnya peran dan koordinasi internal dan eksternal antar perangkat daerah.
- 5) Rendahnya kesempatan aparatur dalam meningkatkan kompetensinya.
- 6) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya perangkat Teknologi.

b. Peluang

Sementara, beberapa peluang Sekretariat DPRD untuk menjawab beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan adalah:

- 1) Telah diterbitkannya beberapa regulasi baru terkait pelaksanaan keprotoleran, hak dan keuangan anggota DPRD, pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, serta pedoman tata tertib DPRD.
- 2) Tetap diupayakannya adaptasi atas Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD.
- 3) Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, dan tetap diupayakannya penguatan kerjasama dengan Organisasi perangkat daerah atau Instansi terkait dan Anggota Forkopimda untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD seperti dialog atau dengar pendapat penerimaan Aspirasi dari masyarakat, melibatkan DPRD dalam kegiatan Musrenbang dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- 4) Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dimasa yang akan datang.
- 5) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya perangkat Teknologi.

4. Rekomendasi Pelaksanaan Pelayanan.

Dalam rangka penanggulangan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang ada, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai untuk ditindak lanjuti dalam penyusunan program/kegiatan sebagai berikut:

- a) Memanfaatkan semaksimal mungkin struktur organisasi, jumlah pegawai, sarana dan prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng
- b) Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.
- c) Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.
- d) Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan



pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

RKPD Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya pada umumnya masih dilaksanakan pada Tahun 2024.

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 juga merupakan acuan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah termasuk Sekretariat DPRD. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Sekretariat DPRD harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD. Adapun proses alasan telaahan yang dilakukan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Sekretariat DPRD yang tercantum di dalam RKPD 2025;
- 2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
- 3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Sekretariat DPRD yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
- 4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Sekretariat DPRD yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan hasil analisis RKPD Kabupaten Soppeng Pada Tahun 2024 yang dibandingkan dengan Renja Sekretariat DPRD dapat disimpulkan bahwa dari pagu anggaran sebesar **Rp. 28.857.951.590,-** dan telah didistribusikan pada 63 subkegiatan sebagaimana telah termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024, tidak terdapat perbedaan dimana program-program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yang merupakan program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala prioritas.

Sehingga dapat dikatakan pula, tidak ada temuan pada proses analisa RKPD Tahun 2024 ataupun catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program cocok namun besarnya berbeda.

Adapun perbandingan rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng dengan hasil analisis kebutuhan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2024 tergambar pada Tabel 2.3 sebagaimana terlampir.

2.5 Penelaan program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Forum SKPD merupakan sumber utama munculnya usulan dari masyarakat baik yang sumbernya dari kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Desa hingga Kabupaten, maupun usulan masyarakat yang dimuat dalam pokok-pokok pikiran Anggota DPRD.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Kabupaten Soppeng, Sekretariat DPRD telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui *SIPD*. Usulan tersebut ditelaah oleh Sub Bagian Perencanaan di Sekretariat DPRD dan kemudian diteruskan kepada Bagian-Bagian terkait untuk diusulkan melalui Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Hasil dari telaahan usulan

masyarat tersebut dialokasi pada Tahun Anggaran 2023, namun tidak terdapat substansi yang terkait dengan program/kegiatan di Sekretariat DPRD.

Dan hingga pelaksanaan penyusunan Renja Tahun 2025 ini, Sekretariat DPRD tidak pernah mendapatkan usulan kegiatan dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan Sekretariat DPRD adalah satuan kerja yang melaksanakan bidang urusan penyelenggaraan tingkat *outcome* Pemerintah Daerah yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Dan dengan tidak adanya usulan tersebut, sehingga tidak ditampilkan matriks mengenai tabel program dan kegiatan dari pemangku kepentingan.





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pada pelaksanaan Pemerintahan Tahun 2020-2024, pemerintah telah menggodok Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Untuk lima tahun ke depan, RPJMN disusun sesuai dengan lima visi utama Presiden Joko Widodo.

Bappenas menyinkronkan RPJMN dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, terlihat bahwa ada kontinuitas dengan RPJMN sebelumnya, di antaranya masih pentingnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada konektivitas dengan kawasan industri menengah dan kecil, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pariwisata, dan kawasan produksi rakyat lainnya. Artinya, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pembangunan wilayah sekitar yang lebih luas.

5 Arah-an Utama Presiden

- 1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- 2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi SDM pembangunan secara multidimensional juga akan dilakukan meliputi pendidikan dan kesehatan. Isu stunting, kesehatan ibu mengandung, dan kematian ibu melahirkan menjadi prioritas. Untuk pendidikan juga bukan lagi bicara angka partisipasi kasar, tapi bicara kualitas pendidikan dan menjadikan vokasi sebagai pendidikan mainstream di Indonesia.

Selain itu, penyelenggaraan birokrasi Indonesia akan diperbaiki sesuai esensinya, yaitu mempermudah dan mempercepat pembangunan nasional. Belum efisiennya penyelenggaraan birokrasi berdampak kemudian terhadap penggunaan APBN yang menjadi visi terakhir Presiden. Meski masih terbatas, nilai APBN setiap tahunnya cukup besar dan perlu diarahkan untuk pengeluaran

yang tepat sasaran dan berdampak jelas bagi perekonomian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sementara sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin

dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan perangkat daerah.

Grafik 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan perangkat daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPRD	78,00%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	85,00%
	Meningkatnya fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD		Nilai Sakip Sekretariat DPRD	63,78%	65,03%	66,27%	67,52%	68,76%	70,01%
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	Persentase Aparatur Yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	77,00%	79,00%	81,00%	83,00%	85,00%	87,00%

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Sekretariat DPRD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan menjadi faktor untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan tentunya faktor penunjang dalam mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD pada tahun berkenan.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan yang terumus dalam Renstra Sekretariat DPRD Perubahan Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2025. Setelah memililah skala prioritas, maka Sekretariat DPRD merencanakan 2 Program kerja yang terdiri yang terjabar dalam 16 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan dengan estimasi anggaran yang dibutuhkan sebesar **Rp.26.193.813.200,-**. Sementara untuk Tahun 2026 diproyeksikan anggaran sebesar **Rp. 26.493.813.000,-**.

Sifat penyebaran lokasi pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan sesuai lokasi pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan yang hampir semua program/kegiatan berlokasi atau dilaksanakan di Kabupaten Soppeng. Beberapa kegiatan yang lokasinya tidak menentu adalah Bimbingan Teknis DPRD, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang lokasi kegiatannya menyesuaikan lokasi kunjungan yang ingin dituju atau sesuai undangan pelaksanaan rapat-rapat ataupun diklat/bimtel/workshop yang dilaksanakan oleh anggota DPRD maupun aparatur Sekretariat DPRD.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 tergambar pada lampiran 3.1





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Hingga pelaksanaan penyusunan Renja 2025, terdapat berbagai perbedaan terhadap apa yang telah direncanakan pada Renstra 2021-2026 dan hasil pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan proyeksi pelaksanaan hingga akhir periode Renstra 2021-2026. Secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Sekretariat DPRD yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra 2021-2026 sebagaimana digambarkan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Proyeksi Pendanaan Hingga Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PERIODE RENSTRA (Rp.x000)						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PERIODE AKHIR RENSTRA
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	5.914.660	4.951.306	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.865.966
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	245.495	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700	1.368.995
Pembahasan Kebijakan Anggaran	39.000	52.400	45.400	45.400	45.400	45.400	273.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	13.150	17.970	20.700	20.700	20.700	20.700	113.920
Peningkatan Kapasitas DPRD	803.850	842.475	842.475	1.067.475	842.475	842.475	5.241.225
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.619.900	1.986.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800	11.553.900
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	22.000	-	-	22.000
Fasilitasi Tugas DPRD	3.193.265	1.826.961	1.879.925	1.632.925	1.879.925	1.879.925	12.292.926
	22.355.100	21.003.982	21.493.813	20.893.813	21.193.813	21.493.813	128.434.334
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.355.100	21.003.982	21.493.813	20.893.813	21.193.813	21.493.813	128.434.334
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.595	48.790	48.790	48.790	55.390	55.390	310.745
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.388.945	2.822.943	3.262.442	2.262.442	2.300.742	2.300.742	16.338.256
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	94.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.500	86.575	86.575	286.575	286.575	286.575	1.095.375
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.051.946	734.651	734.651	734.651	873.651	873.651	5.003.201
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.760.052	851.700	1.341.532	1.541.532	1.350.000	1.350.000	8.194.816
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.129.686	2.082.280	2.082.280	2.082.280	2.289.912	2.289.912	12.956.350
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.979	456.690	456.690	456.690	456.690	456.690	2.691.429
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.746.423	11.923.853	11.923.853	11.923.853	11.923.853	12.123.853	71.565.688
Layanan Administrasi DPRD	1.739.975	1.980.500	1.541.000	1.541.000	1.641.000	1.741.000	10.184.475
JUMLAH	28.269.760	25.955.288	26.493.813	25.893.813	26.193.813	26.493.813	159.300.300

Berdasarkan tabel 4.1, diproyeksikan Sekretariat DPRD akan memenuhi target kinerja programnya dengan estimasi biaya hingga akhir periode Renstra sebesar **Rp. 159.300.299.971,-** (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang disusun secara sistematis, analitis dan koordinatif sehingga menghasilkan strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dimasa yang akan datang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Artinya Perencanaan Strategis akan membantu Organisasi ini untuk menentukan bagaimana mengerjakan sesuatu yang benar atau dibutuhkan (*doing the right thing*) organisasi ini di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaannya beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renja 2025 ini nantinya antara lain:

- Renja Tahun 2025 dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng;
- Renja 2025 menjadi landasan utama penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang mana apabila pada pelaksanaannya terdapat rencana program atau kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kondisi anggaran yang tidak memadai atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hal-hal lainnya maka akan dilakukan revisi pada perubahan Renja 2024 dan dijelaskan lebih lanjut pada Laporan Kinerja Tahun 2025;
- Elemen-elemen mulai dari bab per bab, Tabel dan lain-lain di dalam Renja 2025 ini apabila tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan revisi dan penyesuaian sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagai pelaksana teknis penyusunan Renja 2025 senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran bersama tim kerja yang telah dibentuk melalui Keputusan Sekretaris DPRD.

Begitu pula dalam pelaksanaan Renja 2025 tentu saja beberapa hal perlu dilakukan sebagai bentuk upaya tindak lanjut agar pelaksanaan Renja 2025 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dimulai dengan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan yang merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di dalam kebijakan tersebut. Dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Adapun hal lain yang harus diperhatikan dalam menindak lanjuti Renja 2025 ini adalah:

- Mengupayakan untuk menyusun dokumen perencanaan selanjutnya dengan target kinerja hasil/keluaran yang lebih terukur;
- Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis serta seminar-seminar tentang perencanaan pembangunan;

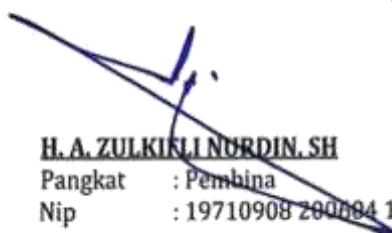


- Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- Menjadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga dengan disusunnya Rencana Kerja ini dapat meningkatkan eksistensi dan kapasitas Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dalam menjawab berbagai permasalahan dan tuntutan perkembangan lingkungan dan masyarakat di daerah, terutama dalam memberikan dukungan yang maksimal guna pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Soppeng yang menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah. Pada gilirannya, sejatinya dapat mewujudkan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 yaitu **“Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”**.

Watansoppeng, 15 Juli 2024,

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,


H.A. ZULKIRLI NORDIN, SH
Pangkat : Pembina
Nip : 19710908 280004 1 006



LAMPIRAN DOKUMEN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

TABEL TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
KABUPATEN SOPPENG

Nama Perangkat Daerah : Sekretaris DPRD

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			
4	02		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
			SEKRETARIAT DPRD								
4	02		PROGRAM DHUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap alat-alat Kelengkapan DPRD yang berlaku sesuai rencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%
4	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Kegiatan Pembentukan Perda yang difasilitasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%
4	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
4	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	11 Dokumen	100.00%
4	02	2.01	04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
4	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitasi	6 Kegiatan				6 Kegiatan	100.00%
4	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
4	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
4	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
4	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
4	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0.00%
4	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
4	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD yang difasilitasi	7 Kegiatan				7 Kegiatan	100.00%
4	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
4	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
4	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
4	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
4	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
4	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	0	0	0	0	0.00%
4	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	0	0	0	0	0.00%
4	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
4	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	5 Kegiatan				5 Kegiatan	100.00%
4	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
4	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
4	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	2 Orang	100.00%
4	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang	100	5 Orang	5 Orang	100.00%
4	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
4	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	2 Kegiatan				2 Kegiatan	100.00%
4	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
4	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
4	02	2.08	Facilitasi Tugas DPRD		Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang difasilitasi	3 Kegiatan				3 Kegiatan	100.00%
4	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 2 Dokumen	1 2 Dokumen	100	1 2 Dokumen	1 2 Dokumen	100.00%

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target kegiatan program dan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
4	02	02	2.08	02	01	2.01	01	2.01	01	2.01	01	2.01	01
4	02	02	2.08	02	01	2.01	01	2.01	01	2.01	01	2.01	01
4	02	02	2.08	04									
4	02	01											
4	02	01											
4	02	01	2.01	01									
4	02	01	2.01	02									
4	02	01	2.01	03									
4	02	01	2.01	06									
4	02	01	2.01	06									
4	02	01	2.02	01									
4	02	01	2.02	01									
4	02	01	2.02	03									
4	02	01	2.02	04									
4	02	01	2.02	07									
4	02	01	2.03	01									
4	02	01	2.03	06									
4	02	01	2.05	01									
4	02	01	2.05	02									
4	02	01	2.05	03									
4	02	01	2.05	04									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023				Target kegiatan program dan tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Target Realisasi (%)	
4	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	36 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang	100	36 Orang	36 Orang	36 Orang	100.00%	
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%									100.00%
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	19 Paket	19 Paket	100	19 Paket	19 Paket	19 Paket	100.00%	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100.00%	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00%	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100.00%	
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100.00%	
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100.00%	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100%									100.00%
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100.00%	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100.00%	
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%									100.00%
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Baik	100%									100.00%
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dilyakatkan Pakainya	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	100	36 Unit	36 Unit	36 Unit	100.00%	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	100	28 Unit	28 Unit	28 Unit	100.00%	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100.00%	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang terlayani administrasi keuangan dan Kesejahteraannya	30 Orang									100.00%
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	100	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	100.00%	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket	100	30 Paket	30 Paket	30 Paket	100.00%	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100.00%	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah paket jasa administrasi DPRD yang disediakan	4 Paket									100.00%
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100.00%	

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

NO	INDIKATOR	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	
	PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017											
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	INDIKATOR TUJUAN											
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Fungsi DPRD		78.00%	78.00%	80.00%	82.00%	85.00%	85.00%		78.00%	78.00%	
5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	
	INDIKATOR SASARAN											
6	Persentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.70%	63.78%	65.03%
7	Persentase Aparatur Yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.06%	89.64%
8	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng		77.00%	79.00%	81.00%	83.00%	85.00%	87.00%	76.57%	79.00%	87.06%	89.64%

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD				Rp. 25.891.813.000,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD				Rp. 26.193.812.200,00
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			100 %	Rp. 4.998.000.000,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			100 %	Rp. 5.000.000.200,00
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			3 Kegiatan	Rp. 224.700.000,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			3 Kegiatan	Rp. 224.700.000,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kec. Lalabua		3 Dokumen	Rp. 55.700.000,00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kec. Lalabua		3 Dokumen	Rp. 55.700.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 30.000.000,00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 30.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kec. Lalabua		3 Dokumen	Rp. 139.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kec. Lalabua		3 Dokumen	Rp. 139.000.000,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran			0 Kegiatan	Rp. 45.000.000,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran			0 Kegiatan	Rp. 45.000.000,00
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 6.400.000,00	Pembahasan KUA dan PPAS	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 6.400.000,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 6.400.000,00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 6.400.000,00
	Pembahasan APBD	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 9.900.000,00	Pembahasan APBD	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 9.900.000,00
	Pembahasan APBD Perubahan	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 9.900.000,00	Pembahasan APBD Perubahan	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 9.900.000,00
	Pembahasan Laporan Semester	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 6.400.000,00	Pembahasan Laporan Semester	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 6.400.000,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 6.400.000,00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 6.400.000,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			7 Kegiatan	Rp. 20.700.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			7 Kegiatan	Rp. 20.700.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Semua Kecamatan		1 Laporan	Rp. 1.450.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Semua Kecamatan		1 Laporan	Rp. 1.450.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Semua Kecamatan		1 Laporan	Rp. 1.450.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Semua Kecamatan		1 Laporan	Rp. 1.450.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Semua Kecamatan		1 Laporan	Rp. 1.450.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Semua Kecamatan		1 Laporan	Rp. 1.450.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Semua Kecamatan		1 Laporan	Rp. 1.450.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Semua Kecamatan		1 Laporan	Rp. 1.450.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Semua Kecamatan		1 Laporan	Rp. 1.450.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Semua Kecamatan		1 Laporan	Rp. 1.450.000,00
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Semua Kecamatan		1 Dokumen	Rp. 1.450.000,00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Semua Kecamatan		1 Dokumen	Rp. 1.450.000,00
	Pengawasan Pengawasan Anggaran	Semua Kecamatan		1 Dokumen	Rp. 6.000.000,00	Pengawasan Pengawasan Anggaran	Semua Kecamatan		1 Dokumen	Rp. 6.000.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Semua Kecamatan		1 Dokumen	Rp. 6.000.000,00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Semua Kecamatan		1 Dokumen	Rp. 6.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas DPRD			5 Kegiatan	Rp. 1.067.475.000,00	Peningkatan Kapasitas DPRD			5 Kegiatan	Rp. 842.475.000,00
	Pendalaman Tugas DPRD	Kec. Lalabua Soppeng (Lokasi Aera)		1 Dokumen	Rp. 525.000.000,00	Pendalaman Tugas DPRD	Kec. Lalabua Soppeng (Lokasi Aera)		1 Dokumen	Rp. 300.000.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Semua Kecamatan		1 Dokumen	Rp. 380.275.000,00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Semua Kecamatan		1 Dokumen	Rp. 380.375.000,00
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kec. Lalabua		2 Orang	Rp. 60.000.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kec. Lalabua		2 Orang	Rp. 60.000.000,00
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kec. Lalabua		5 Orang	Rp. 90.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kec. Lalabua		5 Orang	Rp. 90.000.000,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kec. Lalabua		1 dokumen	Rp. 12.100.000,00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kec. Lalabua		1 dokumen	Rp. 12.100.000,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2 Kegiatan	Rp. 1.906.000.000,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2 Kegiatan	Rp. 1.906.000.000,00
	Pelaksanaan Rees	Kec. Lalabua		3 Dokumen	Rp. 19.800.000,00	Pelaksanaan Rees	Kec. Lalabua		3 Dokumen	Rp. 19.800.000,00
	Facilitasi Tugas DPRD	Semua Kecamatan		3 Dokumen	Rp. 1.967.000.000,00	Facilitasi Tugas DPRD	Semua Kecamatan		3 Dokumen	Rp. 1.967.000.000,00
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kelurahan Soppeng dan Kecamatan Soppeng (Lokasi Aera)		3 Kegiatan	Rp. 1.652.925.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kelurahan Soppeng dan Kecamatan Soppeng (Lokasi Aera)		3 Kegiatan	Rp. 1.579.925.200,00
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kec. Lalabua		1 Laporan	Rp. 100.000.000,00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kec. Lalabua		1 Laporan	Rp. 100.000.000,00
	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 212.526.000,00	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kec. Lalabua		1 Dokumen	Rp. 212.526.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	Rp. 20.899.813.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	Rp. 211.932.813.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	Rp. 48.790.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	Rp. 55.390.000,00
				100 %					100 %	
				100 %					100 %	
				100 %					100 %	
				100 %					100 %	
				100 %					100 %	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp. 15,600,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp. 22,000,000.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp. 12,660,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp. 12,460,000.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp. 8,630,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp. 8,630,000.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	Rp. 12,800,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	Rp. 12,800,000.00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	Rp. 2,262,432,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	Rp. 2,300,572,000.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lalabba	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	Rp. 2,171,092,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lalabba	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	Rp. 2,171,092,000.00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	Rp. 70,550,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	Rp. 105,000,000.00		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	Rp. 15,650,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	Rp. 15,650,000.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp. 5,550,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp. 9,900,000.00		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Rp. 16,000,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Rp. 16,000,000.00		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp. 16,000,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp. 16,000,000.00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Rp. 206,975,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Rp. 206,975,000.00		
	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	Rp. 51,500,000.00	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	Rp. 51,500,000.00		
	Pendataan dan Penggajian Administrasi Kepegawaian	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Pendataan dan Penggajian Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	Rp. 6,050,000.00	Pendataan dan Penggajian Administrasi Kepegawaian	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Pendataan dan Penggajian Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	Rp. 6,050,000.00		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Rp. 7,475,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Rp. 7,475,000.00		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	36 Dokumen	Rp. 6,400,000.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	36 Dokumen	Rp. 6,400,000.00		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lalabba	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	36 Orang	Rp. 5,150,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lalabba	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	36 Orang	Rp. 5,150,000.00		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lalabba	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	Rp. 210,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lalabba	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	Rp. 210,000,000.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	Rp. 873,651,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	Rp. 873,651,000.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Rp. 31,420,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Rp. 31,420,000.00		
	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Rp. 12,242,000.00	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Rp. 12,242,000.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 72,200,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 72,200,000.00		
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp. 23,770,000.00	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp. 23,770,000.00		
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	51 Paket	Rp. 100,504,000.00	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	51 Paket	Rp. 100,504,000.00		
	Facilitas Kunjungan Tamu	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7 Laporan	Rp. 222,900,000.00	Facilitas Kunjungan Tamu	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7 Laporan	Rp. 222,900,000.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Soping Kecamatan Soping Kabupaten Aca	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp. 303,415,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Soping Kecamatan Soping Kabupaten Aca	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp. 303,415,000.00		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Rp. 108,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Lalabba	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Rp. 108,000,000.00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	Rp. 1,541,532,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	Rp. 1,530,000,000.00		
	Pengadaan Mebel	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Rp. 485,332,000.00	Pengadaan Mebel	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Rp. 400,000,000.00		
	Pengadaan Perlengkapan dan Mebel Lainnya	Kec. Lalabba	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Rp. 156,200,000.00	Pengadaan Perlengkapan dan Mebel Lainnya	Kec. Lalabba	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Rp. 450,000,000.00		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Lalabba	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 900,000,000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Lalabba	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 900,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Rp. 2,002,200,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Rp. 2,209,912,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp. 434,480,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp. 642,312,000.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 1,647,600,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lalabba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 1,647,600,000.00		
	Peneliharahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	Rp. 456,690,000.00	Peneliharahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	Rp. 456,690,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Kec. Lalabba	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	36 Unit	Rp. 312,950,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Kec. Lalabba	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	36 Unit	Rp. 312,950,000.00		
	Pemeliharaan Perlengkapan dan Mebel Lainnya	Kec. Lalabba	Jumlah Perlengkapan dan Mebel Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Rp. 241,700,000.00	Pemeliharaan Perlengkapan dan Mebel Lainnya	Kec. Lalabba	Jumlah Perlengkapan dan Mebel Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Rp. 241,700,000.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lalabba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 Unit	Rp. 120,325,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lalabba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 Unit	Rp. 120,325,000.00		
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang terlayani administrasi keuangan dan kesehatannya	30 Orang	Rp. 11,923,853,000.00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang terlayani administrasi keuangan dan kesehatannya	30 Orang	Rp. 11,923,853,000.00		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kec. Lalabba	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	Rp. 11,592,203,000.00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kec. Lalabba	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	Rp. 11,592,203,000.00		
	Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Pakan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	Rp. 294,150,000.00	Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut DPRD	Kec. Lalabba	Jumlah Paket Pakan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	Rp. 294,150,000.00		
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kec. Lalabba	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	Rp. 37,500,000.00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kec. Lalabba	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	Rp. 37,500,000.00		
	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah paket jasa administrasi DPRD yang disediakan	4 Paket	Rp. 1,541,000,000.00	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah paket jasa administrasi DPRD yang disediakan	4 Paket	Rp. 1,441,000,000.00		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Facilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kec. Lalabau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	Rp. 115.000.000,00	Facilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kec. Lalabau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	Rp. 115.000.000,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kec. Lalabau	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	Rp. 1.526.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kec. Lalabau	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	Rp. 1.526.000.000,00	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

15 Juli 2024

Wakil Bupati



H.A. ZULKRIYORDIN, SH

Pangrehan DPRD

KDPPK 197109082900841006

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SOPPENG

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmen 050_5889 Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
					Lokasi Detail	Target 2024	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4											
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp.	26,193,813,200.00			Rp. 26,493,813,000.00
4	2		SEKRETARIAT DPRD								
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap alat-alat kelengkapan DPRD yang terlaksana sesuai rencana		100 %	Rp. 5,000,000,200.00			100 %	Rp. 5,000,000,000.00
4	02	02	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Kegiatan Pembentukan Perda yang difasilitasi		4 Kegiatan	Rp. 224,700,000.00			3 Kegiatan	Rp. 224,700,000.00
4	02	02	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kec. Lalalaba	3 Dokumen	Rp. 55,700,000.00	DTU-DAU		3 Dokumen	Rp. 55,700,000.00
4	02	02	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kec. Lalalaba	11 Dokumen	Rp. 30,000,000.00	DTU-DAU		11 Dokumen	Rp. 30,000,000.00
4	02	02	04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kec. Lalalaba	3 Dokumen	Rp. 139,000,000.00	DTU-DAU		3 Dokumen	Rp. 139,000,000.00
4	02	02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitasi		8 Kegiatan	Rp. 45,400,000.00			8 Kegiatan	Rp. 45,400,000.00
4	02	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Kec. Lalalaba	1 Dokumen	Rp. 6,400,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 6,400,000.00
4	02	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kec. Lalalaba	1 Dokumen	Rp. 6,400,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 6,400,000.00
4	02	02	03	Pembahasan APBD	Kec. Lalalaba	1 Dokumen	Rp. 9,900,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 9,900,000.00
4	02	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Kec. Lalalaba	1 Dokumen	Rp. 9,900,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 9,900,000.00
4	02	02	05	Pembahasan Laporan Semester	Kec. Lalalaba	1 Dokumen	Rp. 6,400,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 6,400,000.00
4	02	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kec. Lalalaba	1 Dokumen	Rp. 6,400,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 6,400,000.00
4	02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD yang difasilitasi		8 Kegiatan	Rp. 20,700,000.00			8 Kegiatan	Rp. 20,700,000.00
4	02	02	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Semua Kecamatan	1 Laporan	Rp. 1,450,000.00	DTU-DAU		1 Laporan	Rp. 1,450,000.00
4	02	02	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Semua Kecamatan	1 Laporan	Rp. 1,450,000.00	DTU-DAU		1 Laporan	Rp. 1,450,000.00
4	02	02	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Semua Kecamatan	1 Laporan	Rp. 1,450,000.00	DTU-DAU		1 Laporan	Rp. 1,450,000.00
4	02	02	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Semua Kecamatan	1 Laporan	Rp. 1,450,000.00	DTU-DAU		1 Laporan	Rp. 1,450,000.00
4	02	02	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Semua Kecamatan	1 Laporan	Rp. 1,450,000.00	DTU-DAU		1 Laporan	Rp. 1,450,000.00
4	02	02	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	Rp. 1,450,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 1,450,000.00
4	02	02	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Semua Kecamatan	1 Dokumen	Rp. 6,000,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 6,000,000.00
4	02	02	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Semua Kecamatan	1 Dokumen	Rp. 6,000,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 6,000,000.00
4	02	02	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi		6 Kegiatan	Rp. 842,475,000.00			5 Kegiatan	Rp. 842,475,000.00
4	02	02	01	Orientasi DPRD	Luar Kabupaten Soppeng (Lokasi Agata)	0	Rp. -	DTU-DAU		-	Rp. -
4	02	02	02	Pendalaman Tugas DPRD	Luar Kabupaten Soppeng (Lokasi Agata)	1 Dokumen	Rp. 300,000,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 300,000,000.00
4	02	02	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	Rp. 380,375,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp. 380,375,000.00
4	02	02	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kec. Lalalaba	2 Orang	Rp. 60,000,000.00	DTU-DAU		2 Orang	Rp. 60,000,000.00
4	02	02	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kec. Lalalaba	5 Orang	Rp. 90,000,000.00	DTU-DAU		5 Orang	Rp. 90,000,000.00
4	02	02	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kec. Lalalaba	1 dokumen	Rp. 12,100,000.00	DTU-DAU		1 dokumen	Rp. 12,100,000.00
4	02	02	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi		2 Kegiatan	Rp. 1,996,800,000.00			2 Kegiatan	Rp. 1,996,800,000.00

Kode		Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmen 050_5889 Tahun 2021		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)			
						Lokasi Detail	Target 2024	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kec. Lalalaba	3 Dokumen	Rp.	19,800,000.00	DTU-DAU		3 kegiatan	Rp.	19,800,000.00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Semua Kecamatan	3 Dokumen	Rp.	1,967,000,000.00	DTU-DAU		3 kegiatan	Rp.	1,967,000,000.00
4	02	02	2.06		Fasilitasi dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi		1 Kegiatan	Rp.	-	-		1 Kegiatan	Rp.	-
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kec. Lalalaba	0	Rp.	-	DTU-DAU		0	Rp.	-
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang difasilitasi		5 Kegiatan	Rp.	1,879,925,200.00			5 Kegiatan	Rp.	1,879,925,000.00
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kabupaten Soppeng dan Luar Kabupaten Soppeng (Lokasi Acara)	1 2 Dokumen	Rp.	1,567,599,200.00	DTU-DAU		1 2 Dokumen	Rp.	1,567,599,200.00
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kec. Lalalaba	1 Laporan	Rp.	100,000,000.00	DTU-DAU		1 Laporan	Rp.	100,000,000.00
							Kabupaten Soppeng dan Luar Kabupaten Soppeng (Lokasi Acara)	1 Dokumen	Rp.	212,326,000.00	DTU-DAU		1 Dokumen	Rp.	212,325,800.00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD		100 %	Rp.	21,193,813,000.00			100%	Rp.	21,493,813,000.00
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %					100%		
						Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu		100 %	Rp.	55,390,000.00			100%	Rp.	55,390,000.00
						Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %					100%		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lalalaba	3 Dokumen	Rp.	22,000,000.00	DTU-DAU		2 Dokumen	Rp.	22,000,000.00
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Lalalaba	2 Dokumen	Rp.	12,460,000.00	DTU-DAU		2 Dokumen	Rp.	12,460,000.00
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Lalalaba	2 Dokumen	Rp.	8,630,000.00	DTU-DAU		2 Dokumen	Rp.	8,630,000.00
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Lalalaba	27 Laporan	Rp.	12,300,000.00	DTU-DAU		27 Laporan	Rp.	12,300,000.00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	Rp.	2,300,742,000.00			17 Dokumen	Rp.	2,300,742,000.00
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lalalaba	36 Orang/Bulan	Rp.	2,171,092,000.00	DTU-DAU		36 Orang/Bulan	Rp.	2,171,092,000.00
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Lalalaba	96 Dokumen	Rp.	105,000,000.00	DTU-DAU		96 Dokumen	Rp.	105,000,000.00
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Lalalaba	36 Dokumen	Rp.	15,650,000.00	DTU-DAU		36 Dokumen	Rp.	15,650,000.00
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Lalalaba	12 Laporan	Rp.	9,000,000.00	DTU-DAU		12 Laporan	Rp.	9,000,000.00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	Rp.	16,000,000.00			1 Buku	Rp.	16,000,000.00
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Lalalaba	4 Laporan	Rp.	16,000,000.00	DTU-DAU		4 Laporan	Rp.	16,000,000.00
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	Rp.	286,575,000.00			36 ASN	Rp.	286,575,000.00
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Lalalaba	68 Paket	Rp.	51,500,000.00	DTU-DAU		68 Paket	Rp.	51,500,000.00
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Lalalaba	5 Dokumen	Rp.	6,050,000.00	DTU-DAU		5 Dokumen	Rp.	6,050,000.00
4	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Lalalaba	2 Dokumen	Rp.	7,475,000.00	DTU-DAU		2 Dokumen	Rp.	7,475,000.00
4	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Lalalaba	36 Dokumen	Rp.	6,400,000.00	DTU-DAU		36 Dokumen	Rp.	6,400,000.00
4	02	01	2.05			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lalalaba	36 Orang	Rp.	5,150,000.00	DTU-DAU		36 Orang	Rp.	5,150,000.00
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lalalaba	25 Orang	Rp.	210,000,000.00	DTU-DAU		20 Orang	Rp.	210,000,000.00
02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	Rp.	873,651,000.00			14 Paket	Rp.	873,651,000.00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmen 050_5889 Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi Detail	Target 2024	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Rp. 31,420,000.00	DTU-DAU		19 Paket	Rp. 31,420,000.00
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Rp. 12,342,000.00	DTU-DAU		15 Paket	Rp. 12,342,000.00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 72,200,000.00	DTU-DAU		1 Paket	Rp. 72,200,000.00
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp. 23,770,000.00	DTU-DAU		6 Paket	Rp. 23,770,000.00
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	Rp. 100,504,000.00	DTU-DAU		5 Paket	Rp. 100,504,000.00
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	Rp. 222,000,000.00	DTU-DAU		7 Laporan	Rp. 222,000,000.00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp. 303,415,000.00	DTU-DAU		12 Laporan	Rp. 303,415,000.00

TABEL 4.1

RENCANA KERJA DAN PROYEKSI PENDANAAN HINGGA AKHIR PERIODE RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA						PERIODE RENSTRA (Rp.000)						PERIODE AKHIR RENSTRA
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	SASARAN 1 : Meningkatnya fasilitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja DPRD	%	78	78	80	82	85	85	85	5,914,660	4,951,306	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
			Persentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	5,914,660	4,951,306	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	5,914,660	4,951,306	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
			Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Bidang-bidang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	5,914,660	4,951,306	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kegiatan	3	3	3	4	3	3	16	245,495	224,700	224,700	224,700	224,700	224,700
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembangunan Peraturan Daerah	Rapat	3	3	3	3	3	3	18	72,885	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kegiatan	11	11	11	11	11	11	66	33,610	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
			Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen	3	3	3	3	3	3	18	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
			Pembahasan APBD	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	9,900	12,100	9,900	9,900	9,900	9,900
			Pembahasan APBD Perubahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	9,900	12,100	9,900	9,900	9,900	9,900
			Pembahasan Laporan Semester	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	-	5,150	6,400	6,400	6,400	6,400
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	6,400	9,250	6,400	6,400	6,400	6,400
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan	7	8	8	8	8	8	47	13,150	17,970	20,700	20,700	20,700	20,700
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hutan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkelompokan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
			Pengawasan Bidang Lanjut Hasil Penyelidikan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	4,450	4,450	6,000	6,000	6,000	6,000
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6	-	4,820	6,000	6,000	6,000	6,000
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Kegiatan	5	5	5	6	5	5	31	803,850	842,475	842,475	1,067,475	842,475	842,475
			Orientasi DPRD	orang	0	0	0	30	0	0	30	-	-	-	-	-	-
			Bimbingan Teknis DPRD	orang	30	30	30	30	30	30	30	340,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat	Kegiatan	48	48	48	48	48	48	288	301,750	380,375	380,375	380,375	380,375	380,375
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	2	2	2	2	2	2	12	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Orang	5	5	5	5	5	5	30	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
			Penyusunan Program Kerja DPRD	dokumen	1	1	1	1	1	1	6	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	12	1,619,900	1,986,800	1,986,800	1,986,800	1,986,800	1,986,800
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	kegiatan	3	3	3	3	3	3	18	22,400	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
			Pelembagaan Reses	kegiatan	3	3	3	3	3	3	18	1,597,500	1,967,000	1,967,000	1,967,000	1,967,000	1,967,000
			Pelembagaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	0	0	0	1	0	0	1	-	-	-	22,000	-	-
			Facilitasi Tugas DPRD	Dokumen	0	0	0	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kegiatan	3	3	5	5	5	5	26	3,193,665	1,826,961	1,879,925	1,632,925	1,879,925	1,879,925
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	kegiatan	23	23	23	23	23	23	138	2,944,600	1,514,635	1,567,599	1,320,599	1,567,599	1,567,599
			Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	1	1	1	1	1	1	6	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			Peningkatan Kapasitas DPRD	kegiatan	52	52	52	52	52	52	312	148,665	212,326	212,326	212,326	212,326	212,326
			Peningkatan Kapasitas DPRD	kegiatan	52	52	52	52	52	52	312	148,665	212,326	212,326	212,326	212,326	212,326

Tujuan	Sasaran	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA							PERIODE RENSTRA (Rp.000)					PERIODE AKHIR RENSTRA		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pisa Sekretariat DPRD		Nilai Sakep Sekretariat DPRD	%	63,78	65,03	66,27	67,52	68,76	70,01	70,01	22.355,100	21.003,982	21.493,813	20,893,813	21,193,813	21,493,813	128,434,334	
			Persentase Aparatur Yang Mendapatkan Nilai SGP berpredikat Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	22,355,100	21,003,982	21,493,813	20,893,813	21,193,813	21,493,813	128,434,334
			Nilai Sakep Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	%	77	79	81	83	85	87	87	87	22,355,100	21,003,982	21,493,813	20,893,813	21,193,813	21,493,813	128,434,334
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	22,355,100	21,003,982	21,493,813	20,893,813	21,193,813	21,493,813	128,434,334
			Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	53,595	48,790	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	30,865,966
			Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100							
			Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100							
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12	19,135	15,400	15,400	15,400	22,000	22,000	109,335
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	9,000	12,460	12,460	12,460	12,460	12,460	71,300
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	13,160	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	56,310
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	11	11	11	11	11	11	11	66	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	73,800		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
</																			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA							Ahir Periode	PERIODE RENSTRA (Rp.x1000)					PERIODE AKHIR RENSTRA		
													2021	2022	2023	2024	2025		2026	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	unit	36	36	36	36	36	36	216	245.179	312.195	312.195	312.195	312.195	1.806.154			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	unit	28	28	28	28	28	28	168	42.100	24.170	24.170	24.170	24.170	162.950			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	meter persegi	20000	20000	20000	20000	20000	20000	120000	120.700	120.325	120.325	120.325	120.325	722.325			
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang terlayani administrasi Keuangan dan Kesejahterannya	Orang	30	30	30	30	30	30	30	11.746.423	11.923.853	11.923.853	11.923.853	11.923.853	71.565.688			
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dibayar lunasannya	Orang	30	30	30	30	30	30	180	11.442.273	11.592.203	11.592.203	11.592.203	11.592.203	69.403.288			
		Penyediaan Paket Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket/atribut yang disediakan	Set	180	180	180	180	180	180	1080	304.150	294.150	294.150	294.150	294.150	1.874.900			
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medical check up	Orang	30	30	30	30	30	30	180	-	37.500	37.500	37.500	137.500	287.500			
		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah paket jasa administrasi DPRD yang disediakan	Paket	4	4	4	4	4	4	24	1.739.975	1.980.500	1.541.000	1.541.000	1.641.000	10.184.475			
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah kebutuhan rapat-rapat DPRD yang disediakan	paket	3	3	3	3	3	3	18	253.975	400.500	115.000	115.000	115.000	1.114.475			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang tersedia	paket	3	3	3	3	3	3	18	1.486.000	1.580.000	1.426.000	1.426.000	1.526.000	9.070.000			
													JUMLAH	28.269.760	25.953.288	26.493.813	25.893.813	26.193.813	26.493.813	159.300.300